

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PEDOMAN

2026

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 10, BD 2026/NO. 10, 24 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK :

- Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk, diperlukan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta mendukung pelayanan publik, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, guna memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, diperlukan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan oleh perangkat daerah yang berwenang. Pengaturan mencakup tugas dan kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kanal layanan, serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum. Selain itu, diatur pula inovasi pelayanan berbasis elektronik dan non-elektronik untuk meningkatkan kemudahan akses layanan serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman : 24 hlm.